



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENSTRA

2025 - 2029



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- c. BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V. Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Dinas Kehutanan;
- x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- aa. Sekretariat Daerah
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala Bappeda.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan lima tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menyusun Renstra Tahun 2025 - 2029 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik.

Samarinda, 30 Oktober 2025

Kepala Badan,



Drs. Sufian Agus, M.Si.

NIP. 19660204 198803 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN LAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	66
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	78
A. Tujuan	78
B. Sasaran	80
C. Strategi dan Arah Kebijakan	85
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB V PENUTUP.....	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Alur tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.....	3
Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.....	17
Gambar 3.1.1. Keterkaitan Asta Cita dan Visi Misi RPJMD	79
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Rekap PNS berdasarkan Golongan dan Gender	32
Tabel 2.2.2. Rekap PNS berdasarkan Eselon dan Gender	32
Tabel 2.2.3. Rekap PPPK berdasarkan Pendidikan dan Gender.....	33
Tabel 2.2.4. Rekap Aset Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	33
Tabel 2.3.1.a Capaian Kinerja TA. 2021-2023	36
Tabel 2.3.1.b Capaian Kinerja TA. 2019-2023	46
Tabel 2.3.1.c Capaian Kinerja TA. 2024	48
Tabel 2.5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan Perangkat Daerah	69
Tabel 3.1. Tujuan RPJMD 2025 - 2029 yang menjadi acuan	80
Tabel 3.2. Sasaran RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan	80
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	82
Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	92
Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	94
Tabel 4.1. Cascading Kinerja Rancangan RENSTRA	93
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	116
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	129
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama	133
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci	133

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik pada dasarnya adalah ikhtiar kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha untuk memperkuat ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (IPOLEKSOSBUD) di Provinsi Kalimantan Timur. Ketahanan ini menjadi syarat mutlak bagi terciptanya iklim demokrasi yang sehat, harmonisasi antar kelompok, serta keberlanjutan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik ini, sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya - upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sehingga, salah satu tahapan proses yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan di bidang ini, yakni penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan dan/atau Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah, sebagai dasar acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu lima tahunan.

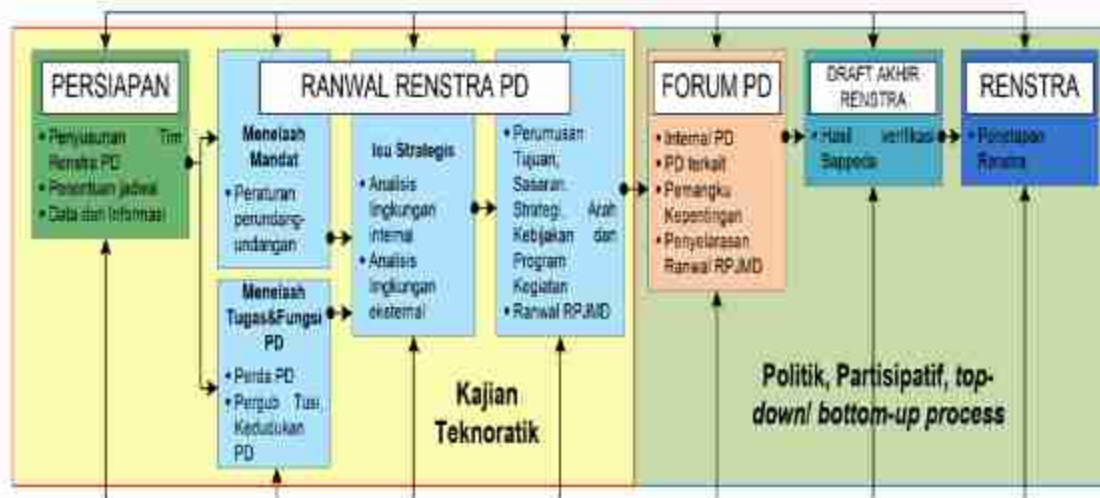
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029, disusun memuat program - program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renja). Rumusan isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menjadi sebuah keniscayaan. Dokumen ini berfungsi sebagai rencana induk pembangunan lima tahunan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program, serta kegiatan prioritas yang selaras dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, dan sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Proses penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, top - down, dan bottom - up process. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan atas - bawah dan bawah - atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1.1.

Alur tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:
 - a) pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Tahap penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup:
 - a) analisis gambaran pelayanan;
 - b) analisis permasalahan;
 - c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d) analisis isu strategis;
 - e) perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPD;

- f) perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan RPD.
3. Tahap pembahasan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan RPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah selaras dengan Rancangan RPD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.
4. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Setelah verifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam tahap sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bappeda.

5. Tahap penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyampaian rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah diverifikasi oleh Bappeda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pergub sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD ditetapkan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode satu tahunan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting bertujuan diantaranya untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; dan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, disusun selain berpedoman kepada RPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPD, mempunyai hubungan keterkaitan juga dengan dokumen Renstra K/L.

Hubungan dokumen Renstra Badan Kesebangpol Provinsi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur. RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L. Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri) dilakukan melalui penyesuaian pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi ini, memiliki sinergitas dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 - 2029. Tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja serta akuntabilitas selama lima tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
29. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
30. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - nilai Pancasila;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
52. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
54. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika;
55. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
56. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
58. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;
59. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

60. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
61. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029 disusun dengan maksud, yaitu:

1. Mendeskripsikan secara prespektif arah dan pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
2. Menganalisis permasalahan dan isu - isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik tiga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan eksternal pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur lima tahun kedepan;
4. Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029, yaitu:

1. Tersedianya pedoman pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan regulasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tersedianya instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

4. Tersedianya pedoman penilaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025 - 2029 ini terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN LAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok sasaran layanan.

Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:

1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
2. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;

2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan tentang substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN LAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- k. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

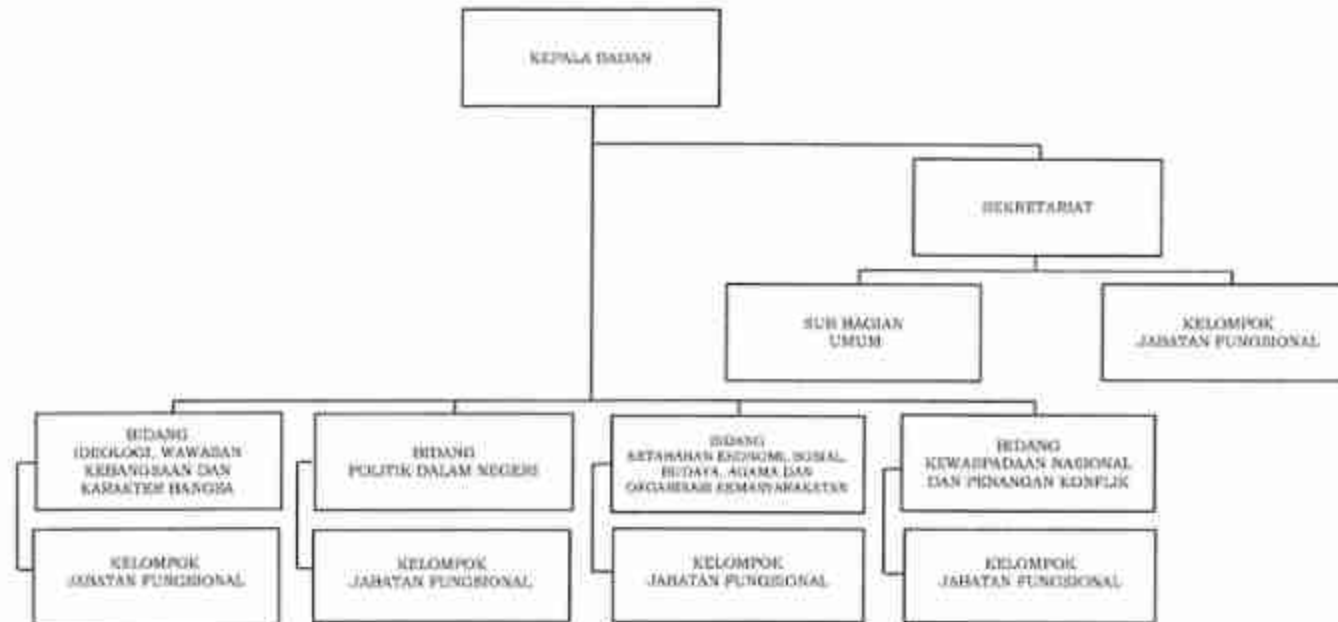
- a. Merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis bidang bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat;
- f. Menetapkan prosedur tetap/sop di bidang bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional berdasarkan peraturan gubernur kalimantan timur sebagai acuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kerja;
- g. Memantau pelaksanaan program kerja di bidang bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan rencana strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan gubernur baik lisan maupun tertulis.

STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Salfan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,

SUBARDI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
rd
ISRAN NOOR

Gambar 2.1.1.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Adapun tugas dan fungsi masing - masing bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan kepala badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Menghimpun perencanaan program kegiatan badan dan menyusun perencanaan program Sekretariat pada

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset
 - f. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - g. Mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi Sekretariat di lingkungan pemerintah;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- b. Menyusun bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya berdasarkan peraturan dan pedoman serta ketentuan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan kegiatan perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan sesuai prosedur yang ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi tata naskah dinas dan penataan kearsipan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- e. Melaksanakan layanan kepegawaian yang meliputi mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pensiun dalam rangka pemenuhan hak kepegawaian serta tertib administrasi kepegawaian di lingkungan badan;

- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

b) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

- kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
 - e. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyusun konsep rumusan kebijakan bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar tercapainya visi dan misi badan;

- f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat Daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan koordinasi pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk efektivitas kinerja yang memuaskan dalam melaksanakan penguatan ketahanan ideologi;
- h. Melaksanakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam upaya menanamkan rasa cinta kepada tanah air;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.

c) Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik..

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang politik dalam negeri dalam pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang politik dalam negeri dalam pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan dalam pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang politik dalam negeri;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan

- g. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang politik dalam negeri berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyusun konsep rumusan kebijakan politik dalam negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar tercapainya visi dan misi badan;
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi kalimantan timur sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengetahui kekuatan wilayah;
- h. Memantau perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi kalimantan timur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk memastikan pemahaman masyarakat di wilayah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara kesatuan republik indonesia;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala badan baik lisan maupun tertulis.

d) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyusun konsep rumusan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar tercapainya visi dan misi dinas;
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengetahui kekuatan wilayah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi kalimantan timur;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan: dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala badan baik lisan maupun tertulis.

e) **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dalam kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerjaasing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

- kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - d. pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - e. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyusun konsep rumusan kebijakan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencegah potensi kerawanan konflik, baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara serta keberadaan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik wilayah di provinsi kalimantan timur sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengantisipasi dini potensi konflik dan masalah- masalah strategis di daerah;
- h. Melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah provinsi kalimantan timur berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah daerah provinsi kalimantan timur;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala badan baik lisan maupun tertulis.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 49 orang, sebagaimana terlihat dibawah ini:

Table 2.2.1.

Rekap PNS berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
IV	6	2	8
III	15	6	22
II	6	2	8
I	0	0	0
Jumlah	27	10	37

Table 2.2.2

Rekap PNS berdasarkan Eselon dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
I	0	0	0
II	6	2	8
III	15	6	21
IV	6	2	8
Eselon	5	1	6
Non Eselon	22	9	31
Jumlah	27	10	37

Table 2.2.3
Rekap PPPK berdasarkan Pendidikan dan Gender

Jenjang	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
S2	0	0	0
S1	3	1	4
SLTA	2	1	3
SMP	0	0	0
Jumlah	5	2	7

Sedangkan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 (lima) orang.

Adapun jumlah asset/modal dan unit usaha yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Table 2.2.4.
Rekap Aset Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	27.802.091.724,00
1.3.1	TANAH	0,00
1.3.1.01	TANAH	0,00
1.3.2	PERALATAN dan MESIN	27.637.227.724,00
1.3.2.01	ALAT BESAR	37.500.000,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	10.146.217.984,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL dan ALAT UKUR	26.900.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	5.600.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR dan RUMAH TANGGA	7.959.121.615,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI dan PEMANCAR	2.806.811.268,00
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN dan KESEHATAN	5.325.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	59.213.152,00
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	227.986.550,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.10	KOMPUTER	6.342.971.155,00
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN dan PEMURNIAN	0,00
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	19.581.000,00
1.3.2.16	ALAT PERAGA	0,00
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
1.3.3	GEDUNG dan BANGUNAN	0,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
1.3.3.02	MONUMEN	0,00
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN dan IRIGASI	0,00
1.3.4.01	JALAN dan JEMBATAN	0,00
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	0,00
1.3.4.03	INSTALASI	0,00
1.3.4.04	JARINGAN	0,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	164.864.000,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	164.864.000,00
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA GA	0,00
1.3.5.03	HEWAN	0,00
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
1.3.5.05	TANAMAN	0,00
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00
1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
1.5.2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	45.739.530.000,00
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	45.739.530.000,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	0,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.1. dibawah ini:

Tabel 2.3.1.a
Capaian Kinerja TA. 2021-2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	97,00	98,00	99,00	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00	98,99
2	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	100,00	100,00	116,67
5	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	Jumlah DPPA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
9	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	9,00	100,00	100,00	180,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
11	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
12	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
13	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	100,00
14	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
16	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan (TLHP)	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	100,00	100,00
20	Jumlah Dokumen Analisis dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
21	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
22	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
23	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
24	Jumlah Laporan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
25	Jumlah Laporan Rekapitulasi Nilai Aset	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26	Jumlah Laporan Inventarisasi Kendali Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
27	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
29	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab	Orang	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
32	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Non ASN	Orang	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	100,00	100,00	100,00
34	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
37	Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
38	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
39	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
40	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
41	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00	100,00
43	Jumlah Surat Kabar	Surat Kabar	4380,00	4380,00	4380,00	4380,00	4380,00	0,00	100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
44	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00
45	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
46	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
47	Tersedianya Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00	18,00	100,00	18,18	163,64
48	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00	18,00	100,00	18,18	163,64
49	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00	18,00	100,00	18,18	163,64
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
51	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
52	Jumlah Materai	Lembar	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
54	Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN	Laporan	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00	100,00
55	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
56	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00
57	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan	Unit	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Pajak Kendaraan Dinas/Operasional										
58	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
59	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	6,00	7,00	8,00	6,00	10,43	8,00	100,00	149,00	100,00
60	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	7,00	11,00	2,00	7,00	11,00	2,00	100,00	100,00	100,00
61	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	9140,00	10664,00	12187,00	9140,00	15888,00	15791,00	100,00	148,99	129,57
62	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
65	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
67	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	%	74,50	75,00	75,50	74,50	72,00	74,56	100,00	96,00	98,75
68	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	10,00	10,00	2,00	10,00	10,00	2,00	100,00	100,00	100,00
69	Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan	%	56,65	56,75	56,85	56,65	56,75	0,00	100,00	100,00	0,00
70	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	100,00
73	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
75	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	%	27,25	32,70	40,05	27,25	32,70	70,84	100,00	100,00	176,89
76	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
77	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	Organisasi Masyarakat	100,00	120,00	147,00	100,00	120,00	260,00	100,00	100,00	176,87
78	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
81	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
83	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00
85	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Rekomendasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	100,00
86	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
87	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	100,00
89	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
91	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	%	33,66	33,33	33,01	33,66	30,21	20,47	100,00	90,63	62,00
92	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00
93	Jumlah Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Konflik	102,00	101,00	100,00	102,00	64,00	62,00	100,00	63,37	62,00
94	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	100,00
97	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
tan di Kalimantan Timur	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan ormas	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	17,04	20,44	27,25	32,70	40,05	17,04	20,44	27,25	32,70	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	177,26
Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kalimantan Timur	Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	Konflik	102	102	102	100	101	102	102	102	100	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,39
		Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	%	0,00	0,00	33,66	33,33	33,00	1,00	100,00	33,66	33,33	20,47	0,00	0,00	100,00	100,00	161,21

Tabel 2.3.1.c
Capaian Kinerja TA. 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	78.63	78.84	12,217,522,146	11,074,322,964
	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	13,460,406,082	11,425,898,458
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100.00	100.00	635,380,000	506,813,588
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.00	3.00	153,282,000	113,201,800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2.00	2.00	47,662,000	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2.00	2.00	1,842,000	0

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2.00	2.00	24,542,000	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4.00	4.00	408,052,000	393,611,788
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	96.50	97.27	11,083,712,146	10,299,194,376
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45.00	40.00	10,423,471,146	9,765,567,276
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	12.00	472,080,000	472,080,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	12.00	6,732,000	0

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	0.00	1,015,000	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12.00	12.00	178,812,000	61,547,100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.00	1.00	1,602,000	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	30.00	30.00	9,703,000	0
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2.00	2.00	1,414,000	0

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	921,000	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.00	2.00	3,684,000.00	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.00	2.00	3,684,000	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	33.00	32.65	488,727,000	268,315,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3.00	3.00	274,365,000	210,815,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	60.00	49.00	7,114,000	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60.00	49.00	7,114,000	0

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45.00	16.00	200,134,000	57,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	95.00	97.94	7,793,645,986	6,502,179,762
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	36,124,000	35,419,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15.00	15.00	4,803,839,986	4,347,737,050
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	185,010,000	138,907,300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6.00	6.00	2,567,822,000	1,886,116,412

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5.00	1.00	200,850,000	94,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100.00	100.00	2,370,611,000	2,323,060,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7.00	7.00	2,370,611,000	2,323,060,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100.00	100.00	2,592,336,756	2,212,530,494
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	1.00	40,055,600	20,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	636,536,840	527,537,578

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13.00	13.00	1,915,744,316	1,664,992,916
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100.00	81.04	703,812,340	388,128,202
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1.00	1.00	81,250,000	78,770,941
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13.00	13.00	202,343,000	110,382,261
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	61.00	30.00	40,600,000	11,400,000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	10.00	5.00	225,573,100	87,235,000

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5.00	5.00	154,046,240	100,340,000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA dan KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100.00	83.33	16,624,125,963	11,740,462,979
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	6.00	5.00	16,624,125,963	11,740,462,979
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	10,910.00	6537.00	3,073,122,900	2,342,845,397

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4.00	4.00	562,788,000	337,046,780
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	1.00	1.00	130,505,000	113,918,000
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	120.00	0.00	147,745,000	

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	4.00	2.00	3,369,539,500	1,383,765,000
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	1.00	1.00	4,514,625,863	3,647,870,700
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	11.00	11.00	2,245,956,100	1,946,650,791
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	3.00	3.00	1,718,720,000	1,381,467,500
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	40.00	40.00	861,123,600	586,898,811
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK dan LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK dan PENGEMBANGAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	1.30	1.16	420,471,468,517	419,601,863,908

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Dokumen	4.00	4.00	420,471,468,517	419,601,863,908
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Orang	3,171.00	4184.00	419,816,280,517	419,055,306,296

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4.00	4.00	655,188,000	546,557,612
PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	31.21	21.47	3,842,636,000	3,455,440,524

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Dokumen	3.00	3.00	3,842,636,000	3,455,440,524
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	2,355.00	1765.00	3,603,248,000	3,220,415,786
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4.00	4.00	239,388,000	235,024,738

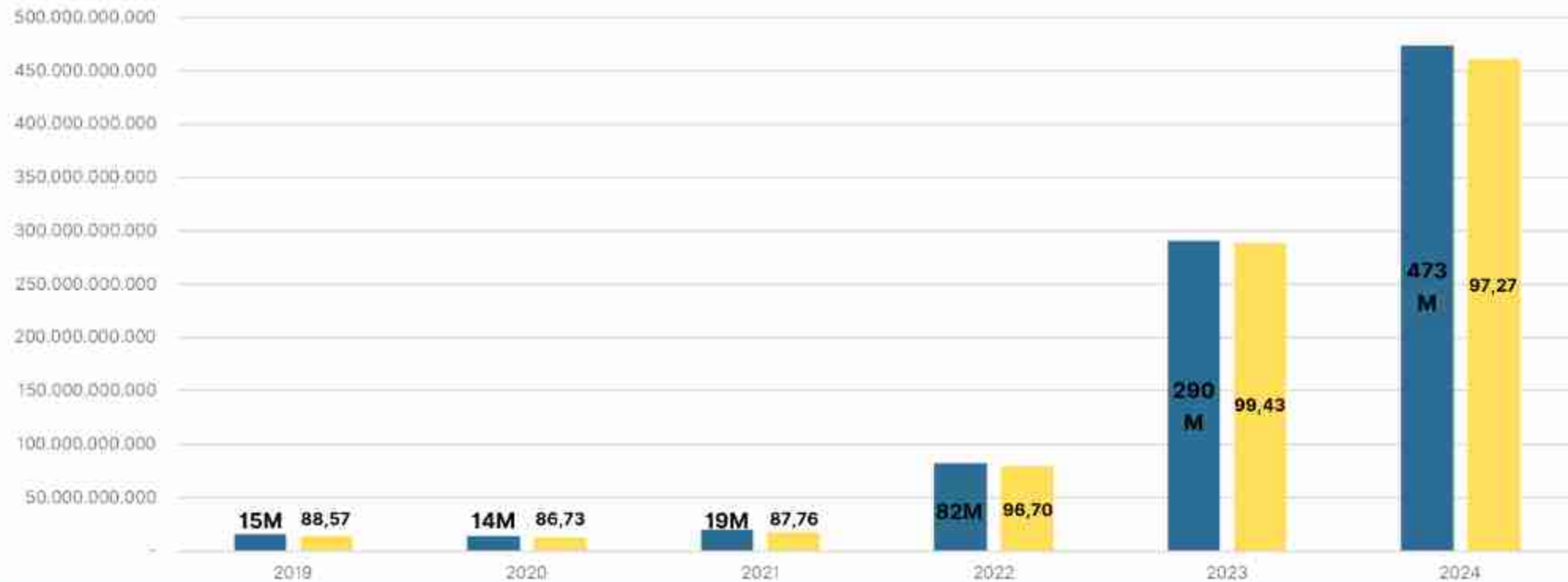
Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
PROGRAM PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, dan BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100.00	100.00	1,730,875,300	1,200,045,870
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	4.00	4.00	1,730,875,300	1,200,045,870
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2,000.00	1310.00	1,529,287,300	1,032,336,625
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Laporan	4.00	4.00	201,588,000	167,709,245

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL dan PENINGKATAN KUALITAS dan FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100.00	100.00	5,614,363,950	2,502,046,840
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	8.00	8.00	5,614,363,950	2,502,046,840
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Orang	2,290.00	1463.00	2,645,195,150	2,131,559,031

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4.00	4.00	352,788,000	347,434,763
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi	Dokumen	12.00	0.00	2,616,380,800	23,053,046

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
	Pimpinan Daerah Provinsi					

Grafik Realisasi Anggaran 2019-2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAGU	15.658.861.000	14.169.818.950	19.695.186.938	82.166.190.481	290.304.868.457	473.961.397.958
REALISASI KEU	13.869.330.691	12.289.643.705	17.284.478.570	79.456.846.717	288.660.776.812	461.000.081.543
REALISASI %	88,57	86,73	87,76	96,70	99,43	97,27

4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan berbagai layanan kepada kelompok sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kelompok sasaran layanan Bakesbangpol meliputi masyarakat umum, partai politik, organisasi kemasyarakatan, forum-forum, pemerintah daerah dan instansi vertikal, pemilih dan masyarakat pemantau politik, pelajar dan mahasiswa, serta kelompok rentan sosial dan masyarakat di wilayah rawan konflik.

Layanan yang diberikan kepada masyarakat umum difokuskan pada pembinaan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan semangat bela negara melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan kebangsaan, dan pembinaan karakter bangsa. Kepada partai politik, Bakesbangpol memberikan layanan berupa fasilitasi pendidikan politik, pembinaan kelembagaan partai, serta penyaluran dan pengawasan bantuan keuangan partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada organisasi kemasyarakatan, layanan yang diberikan meliputi registrasi, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), pembinaan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan agar sejalan dengan peraturan dan nilai-nilai kebangsaan. Forum-forum kebangsaan seperti FKUB, FPK, dan FKDM difasilitasi melalui dukungan koordinatif, pembinaan kapasitas, serta pendampingan kegiatan dalam rangka memperkuat komunikasi antar elemen masyarakat dan menjaga kerukunan sosial di daerah.

Bakesbangpol juga memberikan layanan koordinasi dan integrasi informasi kepada pemerintah daerah serta instansi vertikal dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional, pencegahan konflik sosial, dan penguatan ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Di bidang politik dalam negeri, layanan diberikan kepada pemilih dan masyarakat pemantau politik melalui pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, serta peningkatan

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan kehidupan berdemokrasi.

Selain itu, kepada pelajar dan mahasiswa, layanan diarahkan pada pembinaan karakter kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya persatuan dan toleransi. Sementara itu, bagi kelompok rentan sosial dan masyarakat di wilayah rawan konflik, Bakesbangpol memberikan layanan deteksi dini, fasilitasi mediasi, serta pembinaan daerah rawan sosial politik sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat.

Secara keseluruhan, seluruh layanan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol ditujukan untuk mendukung tercapainya stabilitas daerah, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, demokratis, dan berwawasan kebangsaan.

B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir (2020 - 2024), menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan "*gap expectation*" dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
Masalah Utama Konflik sosial, menurunnya solidaritas, mudah terpengaruh hoaks, krisis kepercayaan pada pemerintah, terhambatnya pembangunan, dan lunturnya nilai kebangsaan	Masalah Tk.2 1.1 Potensi munculnya ATHG yang dapat mengganggu harmonisasi di masyarakat	Masalah Tk.3 1.1.1 Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan	Akar Masalah 1.1.1.1 Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
		Masalah Tk.3 1.1.2 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengaruh negatif dari informasi global	Akar Masalah 1.1.2.1 Minimnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi
			Akar Masalah 1.1.2.2 Kurangnya edukasi tentang hoaks dan propaganda
			Akar Masalah 1.1.2.3 Keterbatasan akses terhadap sumber berita kredibel

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
			Akar Masalah 1.1.2.4 Pendidikan yang kurang menekankan pemikiran kritis
			Akar Masalah 1.1.2.5 Kurangnya pemahaman tentang dampak budaya global
			Akar Masalah 1.1.2.6 Norma sosial yang membentuk cara pandang terhadap informasi
			Akar Masalah 1.1.2.7 Budaya viral dan konsumsi informasi cepat
			Akar Masalah 1.1.2.8 Kurangnya peran media dalam edukasi masyarakat
		Masalah Tk.3 1.1.3 Terjadinya Konflik Sosial dan Disintegrasi Masyarakat	Akar Masalah 1.1.3.1 Ego kedaerahan dapat memperkuat kesenjangan

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
			antara kelompok masyarakat lokal dan pendatang.
			Akar Masalah 1.1.3.2 Konflik antar-etnis atau antar-kelompok kepentingan lebih mudah terjadi, terutama dalam perebutan sumber daya ekonomi dan politik.
			Akar Masalah 1.1.3.3 Perselisihan terkait batas wilayah, lahan, dan hak-hak masyarakat asli bisa semakin tajam.
			Akar Masalah 1.1.3.4 Berita hoaks, ujaran kebencian, dan isu-isu SARA lebih mudah menyebar dan memicu konflik horizontal.
			Akar Masalah 1.1.3.5 Ketidakstabilan sosial bisa

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
			muncul akibat sentimen kedaerahan yang berlebihan, sehingga masyarakat lebih mementingkan identitas kelompok dibanding persatuan.
			Akar Masalah 1.1.3.6 Rendahnya pemahaman manajemen konflik membuat penyelesaian masalah cenderung dilakukan dengan cara emosional, bukan melalui dialog dan musyawarah.
			Akar Masalah 1.1.3.7 Ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya dapat menimbulkan eksklusivitas sosial.

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
	<p>Masalah Tk.2 1.2 Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat</p>	<p>Masalah Tk.3 1.2.1 Kualitas Organisasi Masyarakat yang belum memenuhi harapan masyarakat</p>	<p>Akar Masalah 1.2.1.1 Kurangnya Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas</p>
			<p>Akar Masalah 1.2.1.2 Adanya ormas yang tidak sesuai AD/ART</p>
			<p>Akar Masalah 1.2.1.3 Ketidakpahaman Organisasi Masyarakat terhadap tata kelola Organisasi</p>
	<p>Masalah Tk.2 1.3 Kurangnya kesadaran dalam penerapan etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari hingga menimbulkan sifat apatis terhadap isu sosial dan politik</p>	<p>Masalah Tk.3 1.3.1 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi</p>	<p>Akar Masalah 1.3.1.1 Kurangnya kurikulum atau materi pendidikan yang membahas demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta etika politik secara mendalam di sekolah</p>
			<p>Akar Masalah 1.3.1.2 Rendahnya literasi politik di</p>

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
			kalangan masyarakat, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh informasi yang bias atau tidak benar
			Akar Masalah 1.3.1.3 Media lebih sering berfokus pada sensasi politik daripada memberikan edukasi yang benar tentang budaya demokrasi
			Akar Masalah 1.3.1.4 Penyebaran berita hoaks dan propaganda politik yang memperburuk pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang sehat
			Akar Masalah 1.3.1.5 Masih kuatnya budaya politik transaksional, seperti politik uang dan politik patronase yang membuat masyarakat lebih

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
			mementingkan kepentingan sesaat daripada nilai-nilai demokrasi
			Akar Masalah 1.3.1.6 Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dan etika dalam berdemokrasi
			Akar Masalah 1.3.1.7 Para pemimpin dan elite politik sering menunjukkan perilaku tidak etis, seperti korupsi, politik identitas, atau kampanye negatif, yang kemudian ditiru oleh masyarakat
			Akar Masalah 1.3.1.8 Tidak adanya sanksi atau konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran etika politik

Masalah Utama	Masalah Tingkat Dua	Masalah Tingkat Tiga	Akar Masalah
			Akar Masalah 1.3.1.9 Kurangnya wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dan memahami nilai-nilai demokrasi dengan baik
			Akar Masalah 1.3.1.10 Partisipasi masyarakat dalam politik sering kali hanya sebatas pemilu, tanpa pemahaman yang mendalam tentang demokrasi yang berkelanjutan

2. Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- d. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- e. Integritas Partai Politik
- f. Peningkatan Kualitas Demokrasi
- g. Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional
- h. Penanganan konflik sosial
- i. Stabilitas Ekonomi, Kerukunan Sosial dan Penguatan Seni budaya Indonesia dalam mendukung Ketahanan Nasional
- j. Fasilitasi dan sinergitas Penanganan Penyakit Masyarakat (Narkoba, Judi Online, LGBTQ, Pornografi, dan Prostitusi)
- k. Peningkatan peran Ormas melalui penguatan kelembagaan, pengawasan, dan pemberdayaan
- l. Penguatan peran pemerintah dalam pengawasan, pemberdayaan ormas serta digitalisasi pendaftaran dan pemanfaatan data ormas
- m. Peningkatan Kewaspadaan Daerah
- n. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Forkopimda
- o. Penguatan FKUB, FPK, FKDM, dan PPWK dalam meningkatkan kewaspadaan nasional

Tabel 2.5.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah berpredikat “sangat baik”</p> <p>2) Perolehan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p> <p>3) Peningkatan birokrasi yang berkualitas, tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori BB atau predikat “baik”</p> <p>4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat</p>	<p>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik</p>			<p>Tiga Agenda Transformasi</p>		<p>Tata Kelola Pemerintahan yang baik</p>

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>baik, tercermin dari nilai AKIP dengan predikat BB atau "sangat baik" yang ditandai dengan meningkatnya efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, penerapan sistem manajemen kinerja yang andal dan didukung teknologi informasi, serta pelaksanaan pengukuran kinerja yang telah menjangkau hingga tingkat eselon III atau koordinator</p> <p>5) Program pelatihan berbasis kompetensi ASN, terutama terkait digitalisasi, penyusunan</p>						

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dokumen perencanaan, keuangan daerah, dan tata kelola berbasis output						
				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Integritas Partai Politik

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Peningkatan Kualitas Demokrasi
				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Penanganan konflik sosial
				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong		Stabilitas Ekonomi, Kerukunan Sosial dan Penguatan Seni budaya Indonesia dalam mendukung Ketahanan Nasional

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
				Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		Fasilitasi dan sinergitas Penanganan Penyakit Masyarakat (Narkoba, Judi Online, LGBTQ, Pornografi, dan Prostitusi)
				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Peningkatan peran Ormas melalui penguatan kelembagaan, pengawasan, dan pemberdayaan
				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Penguatan peran pemerintah dalam pengawasan, pemberdayaan ormas serta digitalisasi pendaftaran dan pemanfaatan data ormas
				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan		Peningkatan Kewaspadaan Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		
				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Forkopimda
				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Penguatan FKUB, FPK, FKDM, dan PPWK dalam meningkatkan kewaspadaan nasional

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum di daerah, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Telaah Rancangan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 merupakan aspek penting agar terjalin sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama dalam menjalankan urusan pemerintahan umum.

Renstra Kemendagri 2025-2029 membawa Visi "*Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi dan Inovatif (BerAKSI) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi tersebut ditopang dengan Misi, berupa:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.
4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang Terkait Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memerlukan perumusan komponen perencanaan yang terstruktur, yaitu tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Keempat elemen ini merupakan bagian integral dari kerangka logis perencanaan pembangunan jangka menengah.

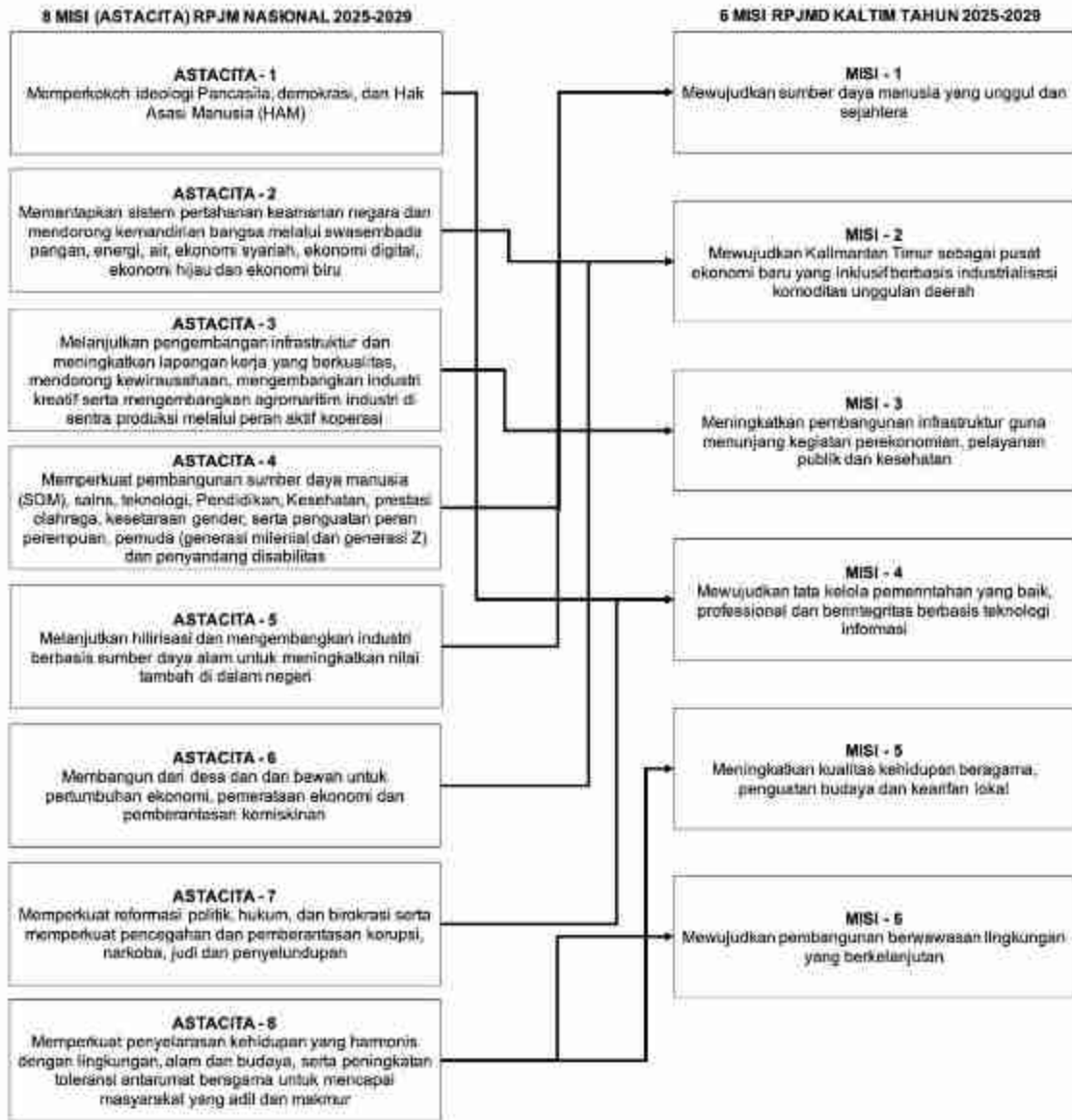
Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah strategis yang sesuai dengan mandat kelembagaan, khususnya dalam memperkuat ketahanan ideologi, menjaga stabilitas politik, serta membangun partisipasi masyarakat yang inklusif. Tujuan ini dijabarkan secara lebih konkret dan terukur melalui sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran capaian.

Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun strategi sebagai pendekatan utama yang mencerminkan langkah-langkah prioritas dan orientasi kebijakan organisasi. Strategi kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan, yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Secara keseluruhan, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesbangpol Kaltim berperan penting sebagai instrumen manajemen strategis guna memastikan bahwa seluruh proses pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berjalan secara terarah, konsisten, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

A. TUJUAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.



Mengacu kepada Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas dan Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel 3.1.
Tujuan RPJMD 2025 - 2029 yang menjadi acuan

TUJUAN	
Uraian	Indikator
Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing - masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan tujuan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada sasaran **Sasaran 8: Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat** dan **Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN**

Tabel 3.2.
Sasaran RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan

Sasaran	
Uraian	Indikator
Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP
	Indeks Inovasi Daerah
	Sistem Merit
	Indeks Pengelolaan Aset

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 3.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Tujuan 1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Provinsi	80,71	80,73	80,75	80,77	80,79	80,81	
		Sasaran 1 Terwujudnya ketahanan dan kewaspadaan daerah yang kuat melalui penguatan ideologi, ketahanan sosial ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman dan gangguan di masyarakat.	Indeks Kewaspadaan Daerah	68,60	68,65	68,70	68,75	68,80	68,85	

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Sasaran 2 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	67	68	69	70	71	72	
		Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran dalam penerapan etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari	Persentase pemahaman etika dan budaya politik di masyarakat	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	
		Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	91,8	91,9	92,0	92,1	92,2	92,3	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,95	73,25	73,95	74,25	77,00	80,00	

Tabel 3.4.
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I Tahun 2026	Tahap II Tahun 2027	Tahap III Tahun 2028	Tahap IV Tahun 2029	Tahap V Tahun 2030
Konsolidasi & Koordinasi Lintas Sektor	Integrasi Data	Evaluasi Capaian, Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor, dan Verifikasi Program Prioritas	Optimalisasi Program	Sustainabilitas, Replikasi, dan Dokumentasi <i>Best Practice</i>

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program - program sebagai prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya - upaya nyata dalam mewujudkan RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur yang difokuskan pada prioritas - prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM</p>	<p>Sasaran 1 Terwujudnya ketahanan dan kewaspadaan daerah yang kuat melalui penguatan ideologi, ketahanan sosial ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman dan gangguan di masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan edukasi dan literasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>Penguatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat</p>
		<p>Meningkatkan edukasi dan literasi terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama kepada masyarakat</p>	<p>Penguatan edukasi dan literasi terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama kepada masyarakat</p>
		<p>Penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial</p>	<p>Optimalisasi koordinasi intelijen daerah dan peningkatan kapasitas analisis isu strategis</p>
		<p>Meningkatkan sinergi penanganan konflik sosial</p>	<p>Fasilitasi penyelesaian konflik sosial</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			secara preventif dan partisipatif
	Sasaran 2 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap regulasi	Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan berdaya guna
	Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran dalam penerapan etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari	Menyelenggarakan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan literasi dan partisipasi politik masyarakat serta Penguatan Kelembagaan Politik
		Meningkatkan pemanfaatan media dan teknologi informasi dalam pendidikan politik	Penggunaan Sarana Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Literasi dan Edukasi
		Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam pendidikan politik	Pelibatan tokoh adat, agama, dan pemuda dalam penguatan etika politik dan demokrasi
		Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi	Sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat
		Penerapan Regulasi yang Mendukung Etika Politik	Deseminasi regulasi kepada masyarakat

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dapat diuraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA dan KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- d. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- e. Pelaksanaan tugas Paskibraka
- f. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
- g. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
- h. Pembentukan Paskibraka

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK dan LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK dan PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, dan BUDAYA

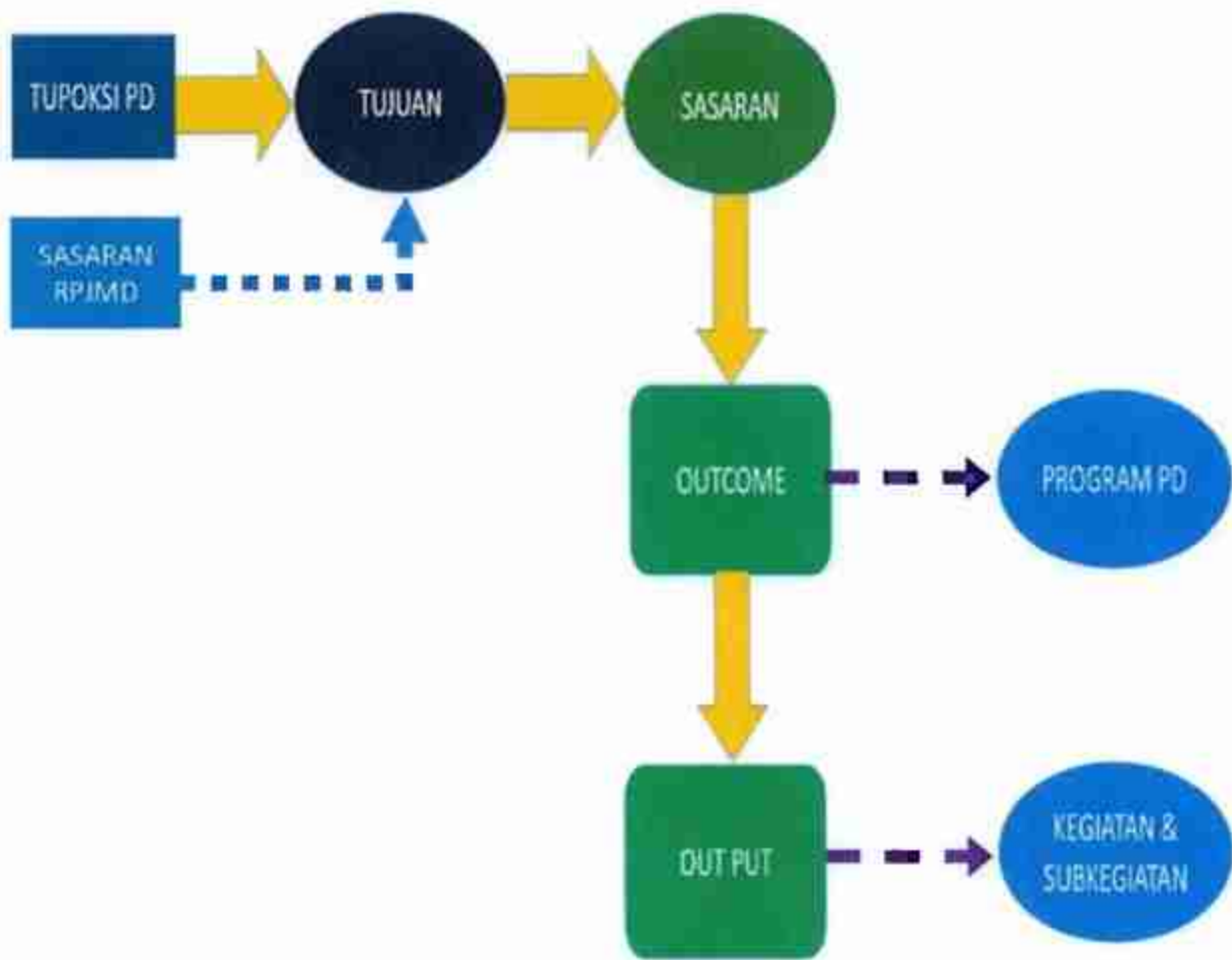
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL dan PENINGKATAN KUALITAS dan FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tabel 4.1. Cascading Kinerja Rancangan RENSTRA

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Tujuan 1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM				Indeks Demokrasi Provinsi	
		Sasaran 1 Terwujudnya ketahanan dan kewaspadaan daerah yang kuat melalui penguatan ideologi, ketahanan			Indeks Kewaspadaan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		sosial ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman dan gangguan di masyarakat.				
			Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tercermin dari terjaganya keharmonisan, toleransi, dan		Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			stabilitas sosial di daerah			
				Rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat dalam pemahaman ideologi pancasila dan		Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			karakter kebangsaan			
				Rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
					Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Pelaksanaan tugas Paskibraka
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
					Jumlah Paskibraka	Pembentukan Paskibraka
			Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat tentang manajemen konflik sosial		Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan kewaspadaan dini			
				Rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 2 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat			Indeks Kinerja Ormas	
			Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat		Presentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Organisasi Masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran dalam penerapan			Persentase pemahaman etika dan budaya politik di masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari				
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Sasaran 9: Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan perangkat daerah yang akuntabel				Nilai AKIP	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan			1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
			Meningkatnya Kualitas		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			Layanan Kesekretariatan		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berfungsi	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dengan baik melalui pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya administrasi kepegawaian yang mendukung peningkatan	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi		
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya administrasi umum perangkat	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				daerah secara tertib, efektif, dan efisien		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar tetap berfungsi baik dan layak digunakan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,84	84,25	13.744.635.754	84,83	13.744.635.754	85,15	13.744.635.754	85,48	13.744.635.754	85,80	13.744.635.754	0,0
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	1.551.676.522	100,00	1.551.676.522	100,00	1.551.676.522	100,00	1.551.676.522	100,00	1.551.676.522	0
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenstase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100,00	100,00	268.105.740	100,00	268.105.740	100,00	268.105.740	100,00	268.105.740	100,00	268.105.740	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	3,00	25.513.200	3,00	25.513.200	3,00	25.513.200	3,00	25.513.200	3,00	25.513.200	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	4,00	123.033.160	4,00	123.033.160	4,00	123.033.160	4,00	123.033.160	4,00	123.033.160	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	2,00	119.559.380	2,00	119.559.380	2,00	119.559.380	2,00	119.559.380	2,00	119.559.380	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97,27	97,50	12.634.489.964	97,75	12.634.489.964	98,00	12.634.489.964	98,25	12.634.489.964	98,50	12.634.489.964	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40,00	49,00	12.206.950.364	49,00	12.206.950.364	49,00	12.206.950.364	49,00	12.206.950.364	49,00	12.206.950.364	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	12,00	426.386.400	12,00	426.386.400	12,00	426.386.400	12,00	426.386.400	12,00	426.386.400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00	12,00	1.153.200	12,00	1.153.200	12,00	1.153.200	12,00	1.153.200	12,00	1.153.200	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30,00	50,00	733.756.600	60,00	733.756.600	65,00	733.756.600	70,00	733.756.600	75,00	733.756.600	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	699.300.000	1	699.300.000	1	699.300.000	1	699.300.000	1	699.300.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	2,00	1.944.400	2,00	1.944.400	2,00	1.944.400	2,00	1.944.400	2,00	1.944.400	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	2,00	32.512.200	2,00	32.512.200	2,00	32.512.200	2,00	32.512.200	2,00	32.512.200	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	32,65	50,00	108.283.450	50,00	108.283.450	50,00	108.283.450	50,00	108.283.450	50,00	108.283.450	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	55,00	49,00	54.196.850	49,00	54.196.850	49,00	54.196.850	49,00	54.196.850	49,00	54.196.850	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49,00	49,00	3.574.400	49,00	3.574.400	49,00	3.574.400	49,00	3.574.400	49,00	3.574.400	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16,00	5,00	50.512.200	5,00	50.512.200	5,00	50.512.200	5,00	50.512.200	5,00	50.512.200	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	97,94	100,00	1.096.716.222	100,00	1.096.716.222	100,00	1.096.716.222	100,00	1.096.716.222	100,00	1.096.716.222	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15,00	15,00	85.992.065	15,00	85.992.065	15,00	85.992.065	15,00	85.992.065	15,00	85.992.065	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	1,00	56.990.630	1,00	56.990.630	1,00	56.990.630	1,00	56.990.630	1,00	56.990.630	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00	1,00	11.880.000	1,00	11.880.000	1,00	11.880.000	1,00	11.880.000	1,00	11.880.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00	6,00	885.988.962	6,00	885.988.962	6,00	885.988.962	6,00	885.988.962	6,00	885.988.962	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00	1,00	54.864.565	1,00	54.864.565	1,00	54.864.565	1,00	54.864.565	1,00	54.864.565	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100,00	100,00	27.397.200	100,00	27.397.200	100,00	27.397.200	100,00	27.397.200	100,00	27.397.200	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7,00	1,00	56.100	1,00	56.100	1,00	56.100	1,00	56.100	6,00	56.100	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00	1,00	25.341.100	1,00	25.341.100	1,00	25.341.100	1,00	25.341.100	1,00	25.341.100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	100,00	145.352.000	100,00	145.352.000	100,00	145.352.000	100,00	145.352.000	100,00	145.352.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	125.352.000	12,00	125.352.000	12,00	125.352.000	12,00	125.352.000	12,00	125.352.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	81,04	85,00	282.211.100	85,00	282.211.100	85,00	282.211.100	85,00	282.211.100	85,00	282.211.100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00	1,00	67.590.000	1,00	67.590.000	1,00	67.590.000	1,00	67.590.000	1,00	67.590.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00	13,00	176.665.000	13,00	176.665.000	13,00	176.665.000	13,00	176.665.000	13,00	176.665.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00	30,00	25.400.000	30,00	24.670.000	30,00	24.670.000	30,00	24.670.000	30,00	24.670.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5,00	5,00	12.556.100	5,00	12.556.100	5,00	12.556.100	5,00	12.556.100	5,00	12.556.100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00	0,00	0	1,00	730.000	1,00	730.000	1,00	730.000	1,00	730.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	83,33	100,00	3.381.297.274	100,00	1.647.552.576	100,00	2.089.063.244	100,00	2.410.482.871	100,00	3.045.846.041	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5,00	1	3.381.297.274	1	1.647.552.576	1	2.089.063.244	1	2.410.482.871	1	3.045.846.041	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.537,00	500	524.769.094	500	255.696.143	500	324.217.523	500	374.101.065	500	472.707.880	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00	4	281.168.105	4	137.000.446	4	173.713.787	4	200.441.087	4	253.274.022	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1,00	1	37.568.618	1	18.305.481	1	23.210.979	1	26.782.179	1	33.841.516	
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2,00	2	466.102.829	2	227.110.737	2	287.971.808	2	332.278.648	2	419.861.769	
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1,00	1	1.683.653.394	1	818.367.825	1	1.038.209.757	1	1.198.254.618	1	1.514.621.761	
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	11,00	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3,00	0	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40,00	40	388.035.234	40	189.071.944	40	239.739.390	40	276.625.274	40	349.539.093	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,16	1,00	10.842.167,30 5	1,00	10.215.388,68 3	1,00	90.375.002,40 7	1,48	210.491.201,14 8	1,62	10.720.895,89 7	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4,00	1	10.842.167,30 5	1	10.215.388,68 3	1	90.375.002,40 7	1	210.491.201,14 8	1	10.720.895,89 7	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	4.184,0 0	500	10.561.722,30 5	500	9.951.156,026	500	88.037.350,08 7	500	205.046.606,60 8	500	10.443.587,72 0	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00	4,00	280.445.000	4,00	264.232.657	4,00	2.337.652.320	4,00	5.444.594.540	4,00	277.308.177	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Organisasi Masyarakat	77,04	79,00	577.889.456	80,00	281.579.283	81,00	357.036.818	82,00	411.969.881	85,00	520.558.286	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3,00	1	577.889.456	1	281.579.283	1	357.036.818	1	411.969.881	1	520.558.286	
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.765,00	500	482.697.956	500	235.196.789	500	298.224.756	500	344.109.098	500	434.810.530	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	4	95.191.500	4	46.382.494	4	58.812.062	4	67.860.783	4	85.747.756	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur (Indeks)	6,85	6,89	1.225.547.041	6,91	597.153.406	6,93	757.178.405	6,95	873.676.554	6,97	1.103.963.154	

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4,00	1	1.225.547.041	1	597.153.406	1	757.178.405	1	873.676.554	1	1.103.963.154	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.310,00	500	1.164.187.454	500	567.255.667	500	719.268.678	500	829.934.102	500	1.048.690.920	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00	4	61.359.587	4	29.897.739	4	37.909.727	4	43.742.452	4	55.272.234	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	100,00	100,00	15.316.172.648	100,00	5.995.134.774	100,00	6.127.820.850	100,00	6.224.416.271	100,00	6.415.360.344	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial														
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfl ik Sosial	8,00	1	15.316.172.648	1	5.995.134.774	1	6.127.820.850	1	6.224.416.271	1	6.415.360.344		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.463,00	500	835.872.648	500	327.181.555	500	334.422.833	500	339.694.480	500	350.115.160		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	4,00	4	180.300.000	4	70.573.950	4	72.135.914	4	73.273.023	4	75.520.792		

Bidang Urusan / Program / Outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e 2024	Taret dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	0,00	1	14.300.000.000	1	5.597.379.269	1	5.721.262.103	1	5.811.448.768	1	5.989.724.392		

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			Pelaksanaan tugas Paskibraka	
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Pembentukan Paskibraka	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Cara Pengukuran.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	80,71	80,73	80,75	80,77	80,79	80,81	Perhitungan berdasarkan hasil rilis BPS dari 3 Aspek - Aspek Kebebasan - Aspek Kesetaraan - Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
2	Indeks Kewaspadaan Daerah	indeks	68,60	68,65	68,70	68,75	68,80	68,85	Perhitungan Berdasarkan hasil rilis oleh Kemendagri/Ditjen Polpum. - Dimensi Konflik Pemerintahan - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah - Kewaspadaan Informasi Media - Kewaspadaan Dini - Pengawasan orang asing
3	Indeks Kinerja Ormas	indeks	67	68	69	70	71	72	Berdasarkan Perhitungan Ditjen Polum Kemendagri
4	Persentase pemahaman etika dan budaya politik di masyarakat	%	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	$P = \frac{M_e}{M_t} \times 100\%$ Keterangan: - P= Persentase pemahaman etika dan budaya politik di Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Cara Pengukuran.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"> - M_e = Jumlah masyarakat yang memahami etika dan budaya politik - M_t = Total masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pembinaan atau pendidikan politik
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	91,8	91,9	92,0	92,1	92,2	92,3	Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,95	73,25	73,95	74,25	77,00	80,00	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	$IK = (P_{dok} \times 0.40) + (P_{real} \times 0.30) + (P_{sarana} \times 0.05) + (P_{sdm} \times 0.25)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P_{dok} = Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu - P_{real} = Persentase realisasi anggaran - P_{sarana} = Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik - P_{sdm} = Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	$P = \frac{K_t}{K_d} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Persentase keluhan yang ditindaklanjuti - K_t = Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti - K_d = Total keluhan yang diterima 	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	$P = \frac{D_r}{D_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu - D_r = Jumlah dokumen yang ditetapkan tepat waktu - D_t = Total dokumen yang seharusnya ditetapkan 	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	$J = D_r$	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu - D_r = Total dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah dalam periode tertentu 	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	$J = L_e$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah - L_e = Total laporan evaluasi kinerja yang disusun oleh perangkat daerah dalam periode tertentu 	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	$J = B_f$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah - B_f = Total berita acara hasil forum perangkat daerah 	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran	$P = \frac{A_r}{A_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Persentase realisasi anggaran - A_r = Jumlah anggaran yang terealisasi - A_t = Total anggaran yang telah ditetapkan 	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	$J = O_g$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- O_g = Total ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam periode tertentu $J=D_v$	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keterangan: - J = Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD - D_v = Total dokumen penatausahaan serta hasil verifikasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD dalam periode tertentu	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	$J=L_k$ Keterangan: - J = Jumlah laporan keuangan - L_k = Total laporan keuangan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan yang disusun dalam periode tertentu	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik melalui pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	$P = \frac{S_b}{S_t} \times 100\%$ Keterangan: - P = Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik - S_b = Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik - S_t = Total seluruh sarana dan prasarana kantor	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	$J=L_b$ Keterangan: - J = Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- L_b = Total laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah yang disusun oleh SKPD dalam periode tertentu	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	$J=L_p$ Keterangan: - J = Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD - L_p = Total laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun oleh SKPD dalam periode tertentu	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian yang mendukung peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	$P = \frac{S_d}{S_t} \times 100\%$ Keterangan: - P = Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - S_d = Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - S_t = Total SDM aparatur yang ada	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	$J=D_k$ Keterangan: - J = Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian - D_k = Total dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dalam periode tertentu	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	$J=D_m$ Keterangan: - J = Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- D_m = Total dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang disusun dalam periode tertentu	
			$J = P_d$	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Keterangan: - J = Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - P_d = Total pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam periode tertentu	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah secara tertib, efektif, dan efisien	Persentase pelaksanaan administrasi umum	$P = \frac{A_d}{A_t} \times 100\%$ Keterangan: - P = Persentase pelaksanaan administrasi umum - A_d = Jumlah kegiatan administrasi umum yang terlaksana - A_t = Total kegiatan administrasi umum yang direncanakan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	$J = P_k$ Keterangan: - J = Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - P_k = Total paket peralatan dan perlengkapan kantor yang berhasil disediakan dalam periode tertentu	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	$J = P_c$ Keterangan: - J = Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- P_c = Total paket barang cetakan dan penggandaan yang berhasil disediakan dalam periode tertentu	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	$J = D_b$ Keterangan: - J = Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan - D_b = Total dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berhasil disediakan dalam periode tertentu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	$J = L_r$ Keterangan: - J = Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - L_r = Total laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan oleh SKPD dalam periode tertentu	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	$J = D_a$ Keterangan: - J = Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD - D_a = Total dokumen penatausahaan arsip dinamis yang dikelola oleh SKPD dalam periode tertentu	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	$J = D_s$ Keterangan: - J = Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- D_s = Total dokumen yang disusun sebagai dukungan terhadap pelaksanaan SPBE pada SKPD dalam periode tertentu	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	$P = \frac{B_a}{B_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Persentase barang milik daerah yang diadakan - B_a = Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan - B_t = Total barang milik daerah yang direncanakan untuk diadakan 	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	$J = K_d$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan - K_d = Total unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berhasil disediakan dalam periode tertentu 	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	$J = P_m$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah paket mebel yang disediakan - P_m = Total paket mebel yang berhasil disediakan dalam periode tertentu 	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	$J = P_l$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - P_l = Total unit peralatan dan mesin lainnya yang berhasil disediakan dalam periode tertentu 	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	$J = A_t$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan - A_t = Total unit aset tak berwujud yang berhasil disediakan dalam periode tertentu 	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	$P = \frac{J_t}{J_s} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - J_s = Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana - J_t = Total kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan 	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	$J = L_s$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat - L_s = Total laporan hasil kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dalam periode tertentu 	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	$J = L_k$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan - L_k = Total laporan hasil kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber 	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>daya air, dan listrik dalam periode tertentu</p> $J=L_p$ <p>Keterangan: - J = Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan - L_p = Total laporan hasil kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dalam periode tertentu</p>	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	$P = \frac{B_p}{B_t} \times 100\%$ <p>Keterangan: - P = Persentase barang milik daerah yang terpelihara - B_p = Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik - B_t = Total barang milik daerah yang harus dipelihara</p>	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar tetap berfungsi baik dan layak digunakan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$J=K_p$ <p>Keterangan: - J = Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya - K_p = Total unit kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan serta pembayaran pajak dalam periode tertentu</p>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	$J=K_o$ <p>Keterangan:</p>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak serta perizinannya - K_o = Total unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pengurusan perizinan dalam periode tertentu 	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	$J = P_m$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara - P_m = Total unit peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan dalam periode tertentu 	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	$J = A_p$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara - A_p = Total unit aset tak berwujud yang mendapatkan pemeliharaan dalam periode tertentu 	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	$J = G_p$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - G_p = Total unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapatkan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi dalam periode tertentu 	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat dalam pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	$\frac{\sum n}{6} \times 100\%$ n = Elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi 6 elemen: Pemuda, Orpol, Ormas, ASN, Pendidik, Toga/Tomas	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	$J=K_p$ Keterangan: - J = Jumlah rumusan kebijakan. - K_p = Total kebijakan atau dokumen rumusan yang dihasilkan	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	$J=O_k$ Keterangan: - J = Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan - O_k = Total peserta atau individu yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam periode tertentu	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	$J=L_m$ Keterangan: - J = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan - L_m = Total laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	$J=D_k$ Keterangan: - J = Jumlah dokumen hasil pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga - D_k = Total dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pembentukan dan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penumbuhan karakter keluarga terkait pengamalan Pancasila dalam periode tertentu	
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	$J=L_p$ Keterangan: - J = Jumlah laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan pembinaan purnapaskibraka - L_p = Total laporan yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan kepaskibrakaan dan purnapaskibraka dalam periode tertentu	
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	$J=D_p$ Keterangan: - J = Jumlah dokumen pelaksanaan tugas Paskibraka - D_p = Total dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan tugas Paskibraka dalam periode tertentu	
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	$J=L_d$ Keterangan: - J = Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila - L_d = Total laporan yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam periode tertentu	
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	$J=L_b$ Keterangan: - J = Jumlah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- L_b = Total laporan yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam periode tertentu	
Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	$J = P_f$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah Paskibraka - P_f = Total anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang ditetapkan atau dilibatkan dalam periode tertentu 	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	$P = \frac{M_p}{M_r} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik - M_p = Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik - M_r = Total masyarakat sasaran yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan tersebut. <i>dalam hal ini menggunakan DPT</i> 	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	$J = K_p$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah rumusan kebijakan - K_p = Total kebijakan atau dokumen rumusan yang dihasilkan 	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	$J=O_k$ Keterangan: - J = Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan - O_k = Total peserta atau individu yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam periode tertentu	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	$J=L_m$ Keterangan: - J = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan - L_m = Total laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat	Presentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Organisasi Masyarakat	<i>terlampir di akhir halaman</i>	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	$J=K_p$ Keterangan: - J = Jumlah rumusan kebijakan. - K_p = Total kebijakan atau dokumen rumusan yang dihasilkan	
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	$J=O_k$ Keterangan: - J = Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan - O_k = Total peserta atau individu yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam periode tertentu	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	$J=L_m$ Keterangan:	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan - L_m = Total laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun 	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tercermin dari terjaganya keharmonisan, toleransi, dan stabilitas sosial di daerah	Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur	<p>Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu:</p> $IHaI = \sum(k_i \cdot X_i)$ <p>Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) dengan menggabungkan variabel-variabel (X_i) dan bobot (k_i) masing-masing.</p> <p>Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir IHaI.</p> <p>Dalam konteks rumus ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IHaI: Nilai akhir dari Indeks Harmoni. - \sum: Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan. - k_i: Bobot yang diberikan pada setiap variabel X_i. - X_i: Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni. 	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	$J = K_p$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah rumusan kebijakan - K_p = Total kebijakan atau dokumen rumusan yang dihasilkan 	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	$J=O_k$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan - O_k = Total peserta atau individu yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam periode tertentu 	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	$J=L_m$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan - L_m = Total laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun 	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya pemberian edukasi dan literasi masyarakat tentang manajemen konflik sosial dan kewaspadaan dini	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	$P = \frac{K_t}{K_s} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P = Persentase penanganan potensi konflik sosial - K_t = Jumlah potensi konflik sosial yang berhasil ditangani - K_s = Total potensi konflik sosial yang teridentifikasi dalam periode tertentu 	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	$J=K_p$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah rumusan kebijakan - K_p = Total kebijakan atau dokumen rumusan yang dihasilkan 	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	$J=O_k$ <p>Keterangan:</p>	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan - O_k = Total peserta atau individu yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam periode tertentu 	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	$J=L_m$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan - L_m = Total laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun 	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	$J=D_f$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> - J = Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi - D_f = Total dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dalam periode tertentu 	

BAB V PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2025 - 2029, yang dibuat untuk menunjang RPD Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun, pada tahun 2025 sampai dengan 2029 dan akan dilaksanakan secara sungguh - sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Oktober 2025

Kepala Badan,



Drs. Sufian Agus, M.Si.

NIP. 19660204 198803 1 016

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75121.

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 733453

Pos-el kesbangpolkaltim@gmail.com; Laman <http://kesbangpol.kaltimprov.go.id>